

Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua

I Ngurah Suryawan

Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat
e-mail: ngurahsuryawan@gmail.com

Abstract

Local political contestation in Papua during the past decade were very dynamic, especially after the implementation of special autonomy, followed by the establishment of new government units in various parts of Papua. In the wave of political contestation, the identity and cultural background has become the dominant variable. This article observes the role of local elites in managing the identity issues in the midst of political contestation in the case of new government creation, by taking the example of the establishment of Manokwari as the capital of West Papua. The author indicated that some local elites tend to manipulate the cultural identity for personal gain on behalf of the public interest.

Key Words:

local elites; special autonomy; territorial reform; papuan identity; global capital

Abstrak

Kontestasi politik lokal di Papua selama satu dekade terakhir berlangsung sangat dinamis, terlebih pasca pemberlakuan otonomi khusus yang diikuti dengan pembentukan unit-unit pemerintahan baru di berbagai penjuru Papua. Dalam pusaran kontestasi politik tersebut, identitas dan latar belakang budaya menjadi variabel yang dominan. Artikel ini melihat bagaimana peranan elit lokal dalam mengelola identitas khususnya ditengah kontestasi politik pemekaran daerah dengan mengambil contoh kasus pembentukan Manokwari sebagai ibukota Papua Barat. Penulis mengindikasikan sebagian elit lokal cenderung memanipulasi identitas kultural untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan publik.

Kata Kunci:

elit lokallocal; otonomi khusus; pemekaran daerah; identitas Papua; modal global

Pendahuluan

Pemberlakuan UU No 21/2001 tentang otonomi khusus (otsus) dan pemekaran daerah yang tiada henti berimplikasi serius dalam dinamika kehidupan sosial politik di Tanah Papua. Wacana otsus serta

pemekaran daerah memungkinkan adanya guliran dana puluhan triliun rupiah, posisi-posisi baru dalam pemerintahan dan kekuasaan serta peluang investasi di bumi cenderawasih ini. Momentum ini menjadi peluang bagi elit-elit lokal Papua untuk

memanfaatkan situasi dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mereka berlomba untuk merebut akses ekonomi politik, melebarkannya melalui jejaring suku dan marga di birokrasi, dan pertarungan untuk jabatan-jabatan di sentral pemerintahan daerah.

Saya berargumentasi, penetrasi Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kondisi ini sangatlah serius. Inkonsistensi aturan, diskriminasi dalam cara berpikir dan pelaksanaan pembangunan, serta stigmatisasi separatis bagi rakyat Papua yang kritis terhadap kebijakan masih sangat dominan dalam cara penanganan Pemerintah Indonesia terhadap Tanah Papua. Saya melihat, konflik horizontal ini diciptakan oleh Pemerintah Indonesia melalui lingkaran elit lokal yang tidak lain adalah perpanjangan tangan dari kebijakan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Argumentasinya adalah untuk memecah-belah resistensi rakyat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Resistensi yang tumbuh dari rentetan panjang kekerasan kemanusiaan dan pengingkaran identitas budaya serta harkat dan martabat rakyat Papua. Sentimen anti-Indonesia dipecah belah dengan menawarkan dana otsus dan pemekaran daerah sehingga rakyat Papua akan saling tikam antar sesamanya. Sehingga ada istilah di lingkungan rakyat Papua bahwa sekarang zaman "Papua makan Papua", *komin tipu komin* (anak Tanah Papua saling tipu, *baku tipu*). Artikel ini mendiskusikan salah satu strategi pemerintah Indonesia melalui otonomi khusus dan pemekaran yang berimplikasi pada semakin jauhnya cita-cita untuk pemberdayaan orang Papua. Secara lebih detail, artikel ini mengelaborasi pengalaman penelitian lapangan saya berdiskusi dengan para elit lokal di Kota Manokwari dan Jayapura. Saya mewawancarai para elit lokal Papua dari kalangan gereja (pendeta), tokoh media, akademisi, tokoh pemuda

muslim Papua, hingga mama Papua yang berjualan di pasar. Sebagian besar dari mereka bingung dengan adanya dana-dana otsus yang sering mereka dengar di radio dan saksikan di televisi. Sebagian diantara mereka memang secara tidak langsung menikmati dana otsus melalui dana Respek (Rencana strategi pembangunan kampung) lewat pembangunan fisik di wilayah mereka. Tidak lebih dari itu. "Sa tetap hidup begini saja *eee*. Jual pinang dari siang sampe malam. *Dong baku tipu* saja di atas, *tra* pernah peduli dengan *tong pu* nasib ini," kisah Mama Rika yang saya jumpai di Pasar Yotefa pada suatu sore.¹

Saya memandang jurang sosial dan ekonomi pasca otsus dan pemekaran daerah semakin memperhatikan. Tentu ini bukan fenomena khas Papua, hampir seluruh negeri ini mengalami jurang sosial ekonomi yang mencemaskan. Tapi khusus di Tanah Papua, situasi ini sangatlah tidak wajar. Selain kucuran dana otsus yang melimpah, bumi cenderawasih ini sangatlah melimpah dari kekayaan alam. Di setiap sudut tanah ini sudah dikepung perusahaan internasional yang menanamkan investasinya dengan mengeruk kekayaan alam Tanah Papua. Di kepala burung terdapat British Petroleum di Teluk Bintuni dan sebentar lagi pengeboran batu bara di Kepulauan Raja Ampat. Di wilayah pegunungan Papua, gunung yang merupakan nenek moyang bangsa Komoro dikeruk oleh PT Freeport Indonesia. Di daerah Merauke, wilayah perbatasan dengan negara Papua New Guinea, terdapat proyek pengembangan ketahanan pangan dan energi nasional yaitu MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*).

Oleh karena itulah menjadi penting untuk mengelaborasi bagaimana peranan elit lokal dan lingkaran kekuasaan dalam memanfaatkan situasi otsus ini menjadi peluang untuk mengeruk keuntungan

¹ Catatan lapangan Jayapura, 11 November 2010

sebesar-besarnya. Argumentasi saya, kesemrawutan dan inkonsistensi Pemerintah Indonesia dimanfaatkan oleh elit lokal Papua untuk mengambil posisi tawar dengan ancaman-ancaman Papua Merdeka. Sementara itu, pemerintah Indonesia yang masih trauma dan curiga dengan label “gerakan separatis” untuk menamai gerakan-gerakan radikal untuk memperjuangkan kemerdekaan di Papua. Oleh sebab itulah pemerintah Indonesia memerlukan apa yang disebut Pendeta Dr. Benny Giay dalam wawancara pada tanggal 8 November 2010 sebagai “anak didik” birokrasi pemerintah Indonesia yang bermental korup dan serakah. Elit-elit lokal di Papua inilah yang kemudian menjadi “wajah Jakarta”, jejaring, agen-agen yang membuat kebijakan dan kemauan pemerintah Indonesia yang tak terduga bisa hadir dan berjalan di Papua.

Dalam perspektif teoritik, elit-elit lokal Papua yang tumbuh pesat pasca otonomi khusus dan pemekaran daerah menjadi raja-raja kecil yang berebut akses untuk penguasaan ekonomi politik. Timmer (2007) mengungkapkan pemekaran sebagai proses “pemecahan kekuasaan” akhirnya mengarah kepada kontestasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Di samping itu peringai elite politik yang haus kekuasaan semakin menjadi-jadi. Bayangan dari otsus dan pemekaran daerah adalah melahirkan posisi-posisi baru untuk pegawai negeri, peluncuran anggaran dan proyek semakin menguatkan keinginan dari pejabat lokal untuk mendukung pemekaran. Akhirnya yang terjadi adalah arena pertarungan untuk memperebutkan arena kekuasaan di kalangan pemerintahan (birokrasi) dan sudah tentunya sumberdaya alam yang melibatkan identitas-identitas lokal di tanah Papua.

Desentralisasi massif yang ditunjukkan dengan pemekaran daerah memicu terjadinya “faksionalisasi” ketika orang-orang yang difasilitasi oleh elit local memberikan respon terhadap tidak begitu bermaknanya kehadiran pembangunan selama ini bagi masyarakat Papua. Orang-orang mulai bersaing memperebutkan sumber-sumber politis dan ekonomis. Kepentingan pribadi dalam konteks ini adalah hasil pandangan realistik yang terkait dengan janji-janjipembangunan masa lalu maupun masa kini. Elit-elit local yang saling berebut kekuasaan di Papua dalam perspektif Timmer (2008: 624-625) adalah sebagian respon mereka terhadap penundaan pembangunan yang terus saja berlangsung beserta gagalnya kebijakan-kebijakan yang bertujuan memperkuat layanan-layanan bagi rakyat Papua. Dengan kata lain, “kekacauan” di Papua bukanlah sekadar kondisi yang diciptakan oleh “Jakarta” atau sebuah penelantaran; ini adalah kondisi yang menyodorkan kesempatan-kesempatan bagi orang-orang Papua (elit-elit local Papua) yang tahu betul bagaimana harus memainkan system. Fragmentasi yang terjadi pada daerah-daerah pemekaran itulah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan pada komunitas etnis lokal di tanah Papua. Mereka berebut janji kekuasaan politis dan keuntungan ekonomis yang dibayangkan melalui pemekaran daerah. Kondisi ini berpengaruh sangat besar dalam pembentukan konfigurasi politik para elite lokal di daerah pemekaran. Relasi-relasi dan konsesi antara elite politik, industri sumber daya, kepentingan etnis dan daerah dikontestasikan dalam pembentukan identitas ke-papua-an. Para rakyat (elite lokal) di tanah Papua dengan sangat cerdas memainkan otsus dan pemekaran untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Gula-Gula Otsus dan Pemekaran Daerah

Turunnya dana Otsus oleh sebagian aktivis hak asasi manusia di Jayapura sering disebut sebagai *gula-gula* politik dari pemerintah Indonesia (baca:Jakarta). Otsus hadir untuk meredam ketidakpuasan rakyat Papua terhadap ketidaksungguhan Jakarta dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan di Tanah Papua. Selama rezim otoritarian Orde Baru berkuasa, diskriminasi pembangunan, rentetan kekerasan hak asasi manusia, dan tersumbatnya ekspresi identitas sosial dan budaya bangsa Papua menjadi ingatan bersama rakyat Papua. Jatuhnya rezim Orde Baru membuka peluang rakyat Papua untuk menunjukkan ekspresi tuntutan kemerdekaan kepada Indonesia. Presiden BJ Habibie ketika itu mengakomodasi tuntutan para elit Papua yang disebut dengan Tim 100 dengan mengadakan dialog pada Februari 1999. Namun, oleh pemerintah Indonesia, tuntutan kemerdekaan rakyat Papua yang sangat sensitif tersebut direspon dengan turunnya Undang-Undang yang sama sekali tidak berjalan ketika itu yakni Undang-Undang (UU) Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya yang mengatur pemekaran Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat serta pemekaran Kabupaten Paniai, Mimika, Jayapura dan Kota Sorong pada 4 Oktober 1999.

Tentu saja keluarnya UU itu menuai protes keras dari rakyat Papua. Hadirnya UU tersebut seolah memberikan peluang untuk memecah belah Tanah Papua. Tuntutan kemerdekaan semakin menguat sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia. Masa inilah yang sering dinamakan *Papuan Spring* (1999-2000), dimana kemerdekaan memperoleh maknanya yang kuat dalam menunjukkan identitas sosial budaya dan harga diri menjadi bangsa Papua. (Timmer, 2007).

Untuk meredam gejolak tuntutan kemerdekaan itulah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandatangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarnoputri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001. Dalam pasal 76 UU Otsus dinyatakan: "Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang."

Namun, belum lama pelaksanaan UU Otsus, Pemerintah Indonesia melalui presidennya mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2003 untuk memberlakukan kembali UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Pemekaran terus berlanjut, hingga saat ini di Papua sudah terdapat 36 kabupaten/kota, tiga kali lipat jumlah kabupaten/kota sebelum reformasi. Proses pemekaran yang massif tersebut tentu melanggar pasal 76 UU Otsus dan menyingkirkan peranan MRP dan DPRP.

Para elit-elit lokal Papua yang berperan besar dalam otonomi khusus menyebutkan otsus dan pemekaran daerah memungkinkan percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan dan pembangunan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah Otsus dan pemekaran menawarkan bagian yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari proyek-proyek penyerapan sumber daya di Papua, termasuk 70% dari industri minyak dan gas dan 80% dari usaha-usaha pertambangan. Selain itu, Otsus melibatkan dana-dana khusus yang menguntungkan

komunitas-komunitas pedesaan untuk jangka waktu 20 tahun. (Sumule, 2003; Timmer, 2007: 605) Seorang pejabat lokal di Manokwari yang saya temui dengan entengnya menyebutkan sangat mendukung otsus dan pemekaran daerah. "Nanti *tong* bisa siapkan anak-anak untuk menjadi pegawai nanti *toh*," ujarnya enteng.²

Otsus dan pemekaran daerah secara tidak langsung menawarkan jabatan-jabatan birokrasi bagi rakyat Papua dan tentunya wewenang dan kekuasaan lebih penuh kepada elit lokal untuk memegang posisi penting sebagai bupati, wakil bupati atau gubernur dan wakil gubernur. Otsus dan diikuti dengan pemekaran daerah menjadi teritorialisasi kekuasaan, lokalitas kekuasaan yang berujung kepada tuntutan-tuntutan masyarakat lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Di samping itu peringai elite politik yang haus kekuasaan semakin menjadi-jadi. Akhirnya yang terjadi adalah arena pertarungan untuk memperebutkan arena kekuasaan di kalangan pemerintahan (birokrasi) dan sudah tentunya sumberdaya alam yang melibatkan identitas-identitas lokal di Tanah Papua.

Selama penelitian singkat di Manokwari, saya melihat peranan elit lokal dengan dukungan marga atau suku sangat kental sekali. Saya melihat fenomena ini menjadi implikasi yang serius dari kemunculan elit-elit lokal yang merasa paling berhak atas posisi-posisi di birokrasi dan menikmati sumber daya alam di daerah mereka. Sentimen masyarakat dengan suku dan marga ini berdampak kepada kecurigaan kepada masyarakat lainnya. Jika seorang elit lokal memegang posisi penting di pemerintahan, hampir bisa dipastikan isi sebagian besar staf departemen tersebut adalah saudara dari marganya. Hingga muncul salah satu istilah SOS

(Semua Orang Sorong) atau A3 (Aifat, Aitinyo, Ayamaru) untuk menyebutkan hampir semua anggota marga dibawa untuk dipekerjakan di birokrasi.

Manokwari: Rakyat *Dong* yang Menjadi Korban

Kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat dipilih sebagai lokasi penelitian dengan mempertimbangkan fakta bahwa di geliat perubahan sosial dan modernisasi terjadi begitu pesat. Di Manokwari, sejak zaman kolonial telah menjadi salah satu pusat terpenting interaksi arus kekuatan-kekuatan politik ekonomi dan budaya dunia dengan masyarakat lokalnya.

Suku bangsa Arfak adalah masyarakat asli yang mendiami daerah Manokwari. Empat suku asli Arfak tersebut adalah Suku Hatam, Moule, Sough, dan Meyakh. Fam besar dari Suku Hatam yaitu Mandacan menguasai tanah di Kota Manokwari. Suku asli Arfak lainnya mendiami wilayah sekitar Pegunungan Arfak yang terbagi dalam lima Kecamatan yaitu Anggi, Warmare, Oransbari, Ransiki, dan Minyambou.

Kota Manokwari juga menjadi sentral dari proses modernisasi dan perubahan sosial di provinsi yang baru terbentuk tahun 2003 ini. Kondisi inilah yang akan menghasilkan isu perubahan sosial yang kompleks dan potensial untuk memberi pelajaran bagi pemahaman yang komprehensif tentang proses transformasi sosial budaya di Provinsi Papua Barat.

Penetrasi investasi modal berlangsung kencang di Kota Manokwari. Diantaranya yang terbesar adalah investasi Grup Hady dengan Hadi Mall dan Hotel Swiss-Bell (Grup Choice yang memegang Hotel Mariot). Fulicia Manokwari membangun Hotel Meridien di Kawasan Sowi Gunung (hotel bintang 4 pertama di Manokwari). Ini tentu saja belum termasuk ratusan pedagang-pedagang dari Sulawesi, Jawa

² Catatan lapangan Manokwari, 15 Agustus 2010

dan darah lain di Indonesia yang mengadu peruntungan di Manokwari, Papua Barat. Maka tidaklah heran jika pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian di Papua Barat, di Kota Manokwari khususnya akan banyak ditemui pedagang-pedagang yang berasal dari Sulawesi dan Jawa. Jika lebih detail melihat, karyawan-karyawan toko-toko, kasir di supermarket hingga buruh angkut di pasar sangat jarang ditemui orang asli Papua.

Pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan, toko-toko, hotel-hotel berbintang terus berlangsung tanpa henti. Manokwari menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial politik dan kebudayaan di Provinsi Papua Barat selain tentunya Kota Sorong. Arus pendatang menuju Manokwari seolah tidak terelakkan. Berbagai macam peluang usaha di sektor ekonomi dan posisi-posisi birokrasi pemerintahan menjadi daya tarik. Jalur investasi juga terbuka melalui pembukaan perkebunan kelapa sawit, pendirian supermarket, dan pendirian hotel-hotel mewah.

Kota Manokwari kini tengah berkembang untuk mengaktifkan dirinya membangun hubungan dengan daerah lainnya. Salah satu persoalan terbesar yang selalu dihadapi di Papua adalah jarak dan transportasi. Daerah-daerah pedalaman sangat sulit dijangkau karena jarak yang jauh dan transportasi yang tersedia sangat terbatas. Pada tahun 2009 dibuka jalan darat antara Manokwari dan Sorong sejauh 600 km atau sama dengan jalan Semarang-Jakarta. Dengan dana Otsus 2009 untuk Papua Barat sebesar Rp. 1,118 triliun ditambah dengan dana alokasi khusus Rp. 600 milyar khusus untuk infrastruktur, seharusnya pelayanan pembangunan kepada masyarakat tidak diragukan lagi (*Kompas*, 23 Februari 2010).

Seiring dengan laju pembangunan dan modernisasi di Kota Manokwari, terutama sejak reformasi dan menjadi ibukota

propinsi, beragam persoalanpun timbul. Persoalan kemiskinan rakyat di pegunungan masih menjadi hal yang sangat serius, program akses pendidikan juga sangat memprihatinkan. Pelayanan kesehatan kepada rakyat jauh dari kesan baik dan masalah HIV/AIDS yang terus menggerogoti kehidupan rakyat. Di tingkat pemerintahan, masalah korupsi dan perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok suku terus terjadi. Masuknya para pendatang dan merebut peluang-peluang usaha ekonomi menimbulkan ketegangan antara penduduk asli Papua.³

Catatan lapangan saya di Manokwari dan Jayapura menimbulkan kesan mendalam. Saya menjadi teringat kata seorang mahasiswa saya di Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat. Saat itu dia bercerita kondisi di kampungnya di sebuah desa kecil di pesisir Pulau Papua. Dari sejak ia mengenyam bangku SMA tahun 2007 hingga sekarang belum ada perubahan berarti di sekitar kampungnya. Jalan-jalan masih dengan tanah dan bangunan SD tempatnya bersekolah dulu kadang-kadang atapnya bocor. Memang di Kota Biak pembangunan gedung-gedung berlangsung tanpa henti, namun di kampung-kampung kondisi sebaliknya terjadi. "Mama-mama dan masyarakat *dong* masih tetap hidup tanpa perubahan. Mungkin yang berubah *tuh* para pejabat *dong* dan yang atas-atas saja," kisahnya. Ia kemudian dengan kasat mata menyaksikan bagaimana puluhan perempuan, mama-mama di kampungnya berkerumun di depan rumah salah satu pejabat daerah yang berasal dari satu marga di kampungnya. Si pejabat ini sangat

³ Beberapa catatan lapangan awal tentang penetrasi modal di Kota Manokwari pernah saya tuliskan dalam makalah "Pemekaran Daerah dan Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" dalam Seminar Internasional Percik 2010 di Salatiga (makalah lengkap belum dipublikasikan).

terkenal menjadi salah satu orang penting dalam pelaksanaan Respek di kampung. Mama-mama berkumpul untuk meminta uang kepada si pejabat. Meski menurut pengakuannya dana Respek telah dibagikan kepada kepala kampung dan masing-masing kepala keluarga, mama-mama mengaku uang tersebut tidak sampai di tangan mereka. Tanpa ragu si pejabat langsung membagikan uang 100 ribuan langsung kepada mama-mama tersebut.

Janji manis pemberdayaan masyarakat melalui Respek ternyata jauh dari kenyataan. Di Manokwari saya menyaksikan dengan jelas bagaimana jurang yang lebar antara masyarakat pegunungan dan perkotaan. Di Pasar Sanggeng sebagai salah satu sentra perekonomian di Kota Manokwari berdiri megah toko-toko dari mulai kelontong, *handphone* hingga jejeran tukang cukur. Deretan sepeda motor para tukang ojek dan toko emas mengitari lokasi yang sering disebut *pasting* (pasar tingkat) Sanggeng. Sementara itu mama-mama Papua berjualan beralaskan tanah di bawah pasar tingkat. Warung-warung makan juga berjejer di depan pasar tingkat dan beberapa toko-toko di depannya. Saat saya memasuki toko dan supermarket, saya melihat tidak satupun pramuniaga, para pelayan toko, yang orang Papua. Dari tiga toko yang saya masuki, hampir semua pegawainya adalah para pendatang yang mengadu nasib di Manokwari. Saat saya memasuki sebuah mini market, saya menyaksikan sebuah fenomena yang menunjukkan begitu lebarnya jurang pemisah antara para pendatang dan orang asli Papua. Seorang mama bersama anak laki-laknya bertelanjang kaki, menggunakan pakaian dan celana kusam tampak ragu-ragu ingin memasuki toko yang menjual beragam kebutuhan pokok. Sejenak ia tampak berbicara dengan anaknya dan meletakkan *noken* (tas tradisional Papua) yang sudah penuh berisi roti tawar, beras, hingga tahu

tempe. Rupanya anaknya tertarik untuk membeli minuman bersoda. Saya melihatnya membeli 2 coca-cola kaleng dan kemudian kembali keluar dan meminumnya di pinggir toko.

Beberapa puluh meter sebelum Pasar Sanggeng, saya melihat kelas menengah di Manokwari yang sebagian besar berseragam aparat pemerintah sedang melewati makan siang di *Kentucky Fried Chicken* (KFC). Sebagian lagi saya lihat sedang berada di lantai 2 melihat-lihat baju dan kebutuhan sandang lainnya. Sementara di depan mall itu saya melihat dua lelaki sedang duduk berkacamata dan menawarkan dua sapu lidi yang berada di kedua tangannya. Saya baru sadar bahwa kedua lelaki Papua itu buta ketika saya coba memegangnya untuk membeli sebuah sapu lidinya. Lelaki itu meraba saya dan seorang pengunjung membisikkan kepada saya bahwa orang itu adalah buta.

Dua lelaki penjual sapu lidi juga saya temu di depan Gramedia Jayapura pada awal November 2010. Di tengah himpitan mobil-mobil yang parkir di depan toko buku terbesar di Jayapura itu, saya melihat dua lelaki penjual sapu lidi di pintu masuk Gramedia. Hampir semua orang saya lihat lalu lalang tidak memperdulikan keberadaan kedua lelaki ini.

Saat saya mengunjungi sebuah kampung di pedalaman Manokwari, saya mendapatkan kesan sangat kuat beberapa diantara mereka ingin menjadi "orang kota", turun ke kota dan mengadu nasib di kota. Beberapa warga di kampung ini telah turun ke kota menjadi pekerja di Pasar Sanggeng di Pasar Wosi, dua pasar besar di Kota Manokwari. Sebagian diantaranya menjadi pekerja kasar di pasar ikan. Sebagian pemudanya bahkan ingin melanjutkan kuliah di universitas. Mereka melihat di kampung mereka tidak ada perubahan sama sekali, meskipun mereka sering dengar di Papua TV (stasiun televisi

bentukan Pemerintah Papua di Jayapura) bahwa dana respek telah masuk ke kampung-kampung.

Saya melihat wacana besar dana otsus pemberdayaan orang asli Papua telah terkuras habis di lingkaran elit lokal di Papua, baik itu di provinsi, kabupaten, distrik maupun kampung-kampung. Beberapa cerita dari para aktivis pendamping kampung yang saya temui di Manokwari dan Jayapura menegaskan hal ini. Setelah mendapat dana respek, para kepala keluarga akan langsung menuju kota untuk berfoya-foya menghabiskan dana respek yang mereka dapat. Setelah kembali, para istri (mama-mama) akan mendapati suami mereka mabuk atau bahkan tidak akan pulang dalam beberapa hari. Jadi jelaskan bahwa *baku tipu* tujuan dana otsus dan respek untuk pemberdayaan orang asli Papua jauh dari harapan. Yang tetap menjadi korbannya adalah rakyat kecil di Papua yang hingga hari ini menuntut keadilan dan martabat mereka ditegakkan setelah bosan menjadi obyek penipuan dari elit dan kekuasaan.

Baku Tipu, Saling Tikam

Saya menjadi teringat pembicaraan dengan Pendeta Dr. Benny Giay, pada suatu kesempatan di Abepura, Jayapura.⁴ Saat itu, kami bersama-sama mendiskusikan tentang otonomi khusus (otsus) dan peranan para elit lokal di Papua dan Jakarta. "Sekarang ada mitos di Papua banyak uang karena otsus. Semua orang jadi datang ke Papua untuk berebut uang itu," ujarnya. Padahal, uang otsus yang disebut-sebut itu berputar-putar di lingkaran elit lokal Papua saja, ditambah dengan jaringannya di Jakarta dan beberapa elit migran yang memanfaatkan keuntungan. Kesimpulannya, sebagian besar dana otsus dipergunakan untuk kepentingan pejabat dan birokrasi serta pembangunan fisik.

Orang Papua hingga kini seperti berada di persimpangan jalan. Dengan banyaknya uang yang mengalir ke Tanah Papua, banyak orang Papua yang tidak tahu arah kehidupan dirinya dan bangsa Papua secara lebih luas. Semuanya sekarang saling tikam, saling geser untuk memperebutkan jabatan, uang, dan kekuasaan. Janji otsus untuk penguatan, perlindungan, dan keberpihakan terhadap orang Papua tertelan perlombaan untuk memperkaya diri, *baku tipu* (saling tipu) sesama orang Papua untuk memperebutkan *gula-gula* (uang) otsus yang dihidangkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu saja, yang paling pertama dan utama mengakses itu adalah para elit lokal Papua di birokrasi kemudian menyebar ke seluruh lingkaran elit di kampung-kampung, dewan adat, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Otsus sejatinya adalah ruang bagi rakyat Papua untuk menata diri dan memperkuat komitmen untuk pemberdayaan dan perlindungan kepada rakyat Papua. Namun elit lokal yang menjadi perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan Indonesia di Jakarta tidak siap mengelola dana otsus untuk benar-benar diperuntukan demi kepentingan rakyat Papua. Heterogenitas suku dan marga serta fragmentasi kepentingan sangatlah kental mewarnai dinamika elit lokal di Tanah Papua. Identitas budaya Papua tumbuh dalam teritorialisme wilayah masing-masing dengan budaya dan bahasa, kondisi geografis, kepercayaan dan adat yang berbeda-beda.

Eksplorasi memetakan siasat dan kepentingan agen-agen perubahan yang tidak pernah bersatu di Papua dalam studi Timmer (2007 dan Chauvel, 2005) memberikan gambaran yang menarik. Maraknya pemekaran dan Otus yang menjadi "gula-gula" pembangunan di Tanah Papua melahirkan ketergantungan dan jejaring ekonomi politik di lingkungan elite Papua. Identitas ke-Papua-an pun terus

⁴ Catatan lapangan Jayapura, 8 November 2010

bertransformasi dengan serangkaian resistensi terhadap kehadiran negara (Indonesia) yang sudah kehilangan wibawanya di hadapan Bangsa Papua. Tuntutan otsus yang lebih besar bisa dilacak mengalami diversitas di kalangan Bangsa Papua sendiri antara ekspresi resistensi terhadap negara dan nasionalisme perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Silang sengkabut itulah yang memungkinkan kontestasi identitas-identitas sosial lokal, etnis, religius, dan regional di Tanah Papua sebagai medium resistensi terhadap kehadiran negara.

Saya juga melihat kecurigaan Pemerintah Indonesia dalam menabur uang otsus dan membuka ruang-ruang pemekaran daerah untuk memecah belah Tanah Papua. Kecurigaan itu adalah pada stigma separatistis yang masih melekat kuat dalam paradigma berpikir pemerintah Indonesia terhadap gerakan sosial yang kritis terhadap kebijakan otsus dan pembangunan. Argumentasinya adalah kekhawatiran dana otsus akan digunakan untuk memobilisasi gerakan Papua Merdeka. Oleh sebab itulah kebijakan otsus dilanjutkan dengan peluang-peluang pemekaran daerah. Alasan lainnya menurut saya kegagalan pemerintah Indonesia untuk menunjukkan bahwa otsus adalah kebijakan yang "memanusiakan rakyat Papua". Otsus menurut saya tidak lebih dari menabur uang ratusan triliun dan membiarkan rakyat Papua berebut saling tikam dan berkelahi antar sesamanya. Otsus memberikan peluang kepada elit lokal untuk memanfaatkan situasi menjual nilai tawar Papua Merdeka untuk mengeruk uang otsus dan peluang-peluang pemekaran daerah. Seorang akademisi di Jayapura bertutur dengan ringan kepada saya bagaimana dia bersiasat untuk mengelabui pejabat-pejabat di Jakarta. Selain dengan uang, dia bisa memainkan isu-isu Papua Merdeka yang membuat pemerintah Indonesia takut dan

memudahkan apa yang menjadi tujuannya.⁵

Para *Big Man*: Kiprah Elit Lokal

Suatu pagi di dalam *taxi* (angkutan umum di Kota Manokwari, Papua Barat) akhir Desember 2010,⁶ saya mendengarkan perbincangan serius dua *pace* (laki-laki dewasa dalam bahasa Papua) tentang banyaknya penangkapan terhadap tokoh-tokoh Papua yang menyuarakan penderitaan dan ketidakadilan di tanah mereka sendiri. "*Dong* (mereka) hanya bersuara untuk kembali ke budaya lokal Papua saja *toh*. Tapi pemerintah (Indonesia) bilang *dong* berpolitik, separatistis, seperti musuh saja," ujar seorang *pace* sambil mengunyah sirih pinang. Seorang temannya kemudian menimpali, "Kalau begitu sekalian saja sudah *tong* (kita) berpolitik untuk kemerdekaan Papua lepas dari negara ini (Indonesia)."

Dua *pace* ini ternyata sama tujuannya dengan saya. Mereka berdua turun di depan lapangan tempat akan dideklarasikannya pasangan Dominggus Mandacan dan Origenes Nauw sebagai salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat 2012-2017. Keluar dari *taxi* yang kami tumpangi, kedua *pace* ini langsung disambut oleh empat orang berpakaian kaos bergambar kedua calon tersebut. Mereka langsung menyerahkan kaos berwarna putih berisi gambar pasangan calon tersebut. Saya yang bersama mereka turun dari *taxi* terlewatkan. Saya tidak mendapat baju tersebut.

Suasana di tengah lapangan belum begitu ramai. Hanya tampak beberapa undangan yang duduk di beberapa kursi. Sebagian besar kursi masih kosong. Belum lama saya duduk di bagian pinggir kursi undangan, saya mendengar suara sirine berulang-ulang diiringi suara motor dan

⁵ Wawancara di Jayapura, 2 Agustus 2010.

⁶ Catatan lapangan Manokwari 9 Desember 2010.

mobil. Di pintu masuk lapangan yang merupakan rumah Dominggus Mandacan, datang para pendukung yang berasal dari sekitar Kota Manokwari dan sebagian dari daerah pedalaman Pegunungan Arfak. Mereka datang dengan menggunakan truk dan iring-iringan sepeda motor. Sebagaimana diantara mereka menggunakan pakaian adat suku arfak dan menari-nari sebelum memasuki lapangan tempat acara deklarasi pencalonan gubernur ini berlangsung. Tidak beberapa lama kembali terdengar suara sirine dengan dua mobil *hardtop ranger* di depan. Berdiri di atas mobil 2 lelaki setengah baya lengkap dengan busana adat suku masing-masing. Barnabas Mandacan adalah Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Mnuwar yang berkedudukan di Kota Manokwari, Papua Barat. Barnabas Mandacan adalah saudara dari Dominggus Mandacan, mantan Bupati Manokwari yang akan maju dalam pemilihan Gubernur Papua Barat 2012 nanti. Mereka adalah dari Suku Arfak (Hattam) yang meyoritas di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Entah darimana datangnya, sekejap saya melihat lapangan yang tadinya masih tampak lengang telah dipenuhi oleh para simpatisan yang dikenal dengan sebutan DONOR (Dominggus Mandacan-Origenes Nauw) ini. Penyambutan Origenes Nauw yang diantar oleh Barnabas Mandacan berlangsung. Empat perempuan diantar enam laki-laki mengenakan pakaian adat Suku Arfak menyambut kedatangan Origenes Nauw yang berasal dari Suku Ayamaru di Kabupaten Sorong yang bertetangga dengan Manokwari. Selain deklarasi pasangan, acara pagi itu juga adalah "peminangan" Origenes Nauw oleh Dominggus Mandacan sebagai calon wakil gubernur yang akan maju dalam pemilihan.

Pasangan DONOR didukung oleh 12 partai politik, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Nasional Indonesia

Marhainisme (PNI Marhainisme), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Pelopor, Partai PNBKI, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Persatuan Daerah (PPD).

Setelah peminangan yang dilakukan pada 9 Desember 2010, dilakukanlah deklarasi yang berlangsung pada 16 Maret 2011 Dalam orasi politiknya di hadapan ribuan massa pendukung dan simpatisan, Dominggus Mandacan mengajak agar tidak perlu ragu. "Kemenangan sudah berada di depan mata. "Tidak usah ragu, kita pasti menang. Sebab tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tunggu dulu atau saya masih muda, dan tidak ada kata memimpin kabupaten tidak sama dengan memimpin provinsi. Saya mau bilang memimpin provinsi itu tidak berat, yang berat adalah menjadi camat, bupati dan walikota, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Gubernur itu tinggal memutuskan laporan dari para bupati dan walikota, jadi tidak ada yang susah seperti tudingan orang-orang selama ini kepada saya," tegas Dominggus disambut tepukan semangat para pendukungnya. Mandacan dengan berapi-api menyampaikan bahwa DONOR mengusung motto "Dengan Iman, Pengharapan dan Kasih Membangun Papua Barat yang Maju dan Mandiri", sehingga dirinya meyakini kini saatnya Papua Barat menuju suatu perubahan yang signifikan, dan sekarang adalah waktu yang sangat tepat bagi DONOR membuktikan merekalah yang terbaik bagi rakyat. "Ingat suara rakyat suara Tuhan, bagi manusia boleh mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami siap menerima tanggung tugas dan tanggung jawab, siap terima amanah dan maju sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat, tanpa

membeda-bedakan suku, agama dan ras!" seru Dominggus Mandacan (*Cahaya Papua*, 5 Juni 2011).

Namun dalam setiap perebutan kekuasaan di Tanah Papua, kehadiran sentimen marga dan suku tidak dapat dihindarkan. Retorika tidak membedakan suku, agama dan ras dapat dipastikan hanya diucapkan untuk pidato pencitraan. Pada kenyataannya kepentingan kelompok suku dan marga sangatlah kental. Beberapa kliping media massa yang saya kumpulkan menunjukkan bagaimana dominasi suku Arfak di Kota Manokwari dalam setiap perebutan kekuasaan. Salah satunya adalah saat pemilihan Bupati Manokwari 2010. Forum Peduli Suku Besar Arfak (FPSBA) dalam sebuah kesempatan menjelang pemilihan Bupati Manokwari menyerukan agar Bakal Calon Bupati (Balonbup) non Arfak yang akan maju di Pemilu-Kada Manokwari Tahun 2010 ini segera mengundurkan diri. "Demi kepentingan masyarakat Arfak, jangan ada orang yang berupaya menghalangi atau membatalkan aspirasi masyarakat suku besar Arfak itu. Perlu di catat, Bupati Manokwari kedepan harus orang asli Arfak." (*Cahaya Papua*, 12 April 2010).

Interkoneksi Global: Siasat Para Elit

Tanah Papua tidak terhindarkan lagi saat ini berada di garis batas (*frontier*) bertarungnya kekuatan-kekuatan modal investasi perusahaan multinasional yang mengeruk keuntungan dari kekayaan alam tanah ini. Arus globalisasi yang tanpa henti didukung oleh kondisi dari elit-elit lokal yang bersiasat secara oportunistik untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, memanfaatkan peluang dari arus kekuatan modal ini.

Globalisasi seperti yang diungkapkan Ted C. Lewellen (2002: 7-8 dalam Laksono, 2011: 13-14) adalah peningkatan arus perdagangan, keuangan, kebudayaan, gagasan dan manusia sebagai akibat dari

teknologi canggih di bidang komunikasi, perjalanan dan dari persebaran kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia, dan juga adaptasi lokal dan regional serta perlawanan terhadap arus-arus itu. Suka tidak suka, kita menelan dunia dan kita pun ditelan dunia. Globalisasi juga mengobarkan perlawanan, dibenci tapi dirindukan setengah mati.

Globalisasi seringkali dikaitkan dengan isu pasar bebas, liberalisasi ekonomi, westernisasi atau Amerikanisasi, revolusi internet dan integrasi global. Ini tentu saja tidak salah karena globalisasi mula-mula pada tahun 1985 digunakan oleh Theodore Levitt untuk mengacu pada politik ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Pandangan teoritikus sosial kemudian mengungkapkan globalisasi mengacu pada perubahan-perubahan mendasar dalam tekuk-tekuk ruang dan waktu dari keberadaan sosial. Mengikuti perubahan ini, secara dramatik makna ruang atau teritori bergeser dalam akselerasinya pada struktur temporal bentuk-bentuk penting aktivitas manusia. Pada saat bersamaan terjadi juga pengaburan batas-batas lokal bahkan nasional dalam banyak arena kegiatan manusia. Globalisasi dengan demikian mengacu pada bentuk-bentuk aktivitas sosial non teritorial. Lebih dari itu, globalisasi terkait dengan pertumbuhan interkoneksi sosial melintasi batas-batas geografi dan politik atau deteritorialisasi. Globalisasi itu juga terkait dengan pertumbuhan interkoneksi sosial melintasi batas-batas geografi dan politik atau deteritorialisasi. Tahap yang paling menentukan dalam globalisasi adalah ketika peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan yang jauh mempengaruhi prakarsa-prakarsa lokal dan regional.

Saya mendapat kesempatan mengunjungi Kabupaten Teluk Bintuni di Papua Barat. Dari Kota Manokwari, saya menggunakan pesawat kecil menuju daerah yang disebut-

sebut salah satu kabupaten di tanah papua dengan anggaran belanja daerah yang besar ini. Di kabupaten inilah berdiri perusahaan BP (*British Petroleum*) Indonesia yang melakukan eksplorasi gas dengan nama proyeknya, Kilangan LNG Tangguh. Dengan jenis produksi SDA, Gas Alam Cair/LNG. Lokasi aktivitasnya berada di Kawasan Teluk Bintuni yang meliputi wilayah administratif empat (4) distrik (Babo, Bintuni, Aranday dan Merdey) di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Masuknya perusahaan BP sebagai MNC (*Multinational Corporation*) terbesar kedua setelah PT. FI (Freeport Indonesia) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengundang berbagai bentuk program-program “pemberdayaan” terhadap masyarakat tempatan. Berbagai proyek untuk menunjukkan kepedulian sosial perusahaan MNC inipun menggeling mulus untuk masyarakat lokal. Posisi masyarakat tempatan langsung bertemu dengan kekuatan ekonomi global. Berbagai perubahan sosial pun terjadi begitu cepat. Relasi-relasi *baku tipu* ekonomi politik yang “mengalahkan” masyarakat tempatan menjadi cerita yang begitu biasa diungkapkan. Kisah-kisah keterbelakangan yang bertemu dengan simbol modernitas bernama industri kapitalisme internasional bagai kisah ironis yang menyesak dada.

Puncak-puncak kemewahan yang ditunjukkan perusahaan MNC berhadapan dengan kondisi masyarakat tempatan, yang sebenarnya mempunyai hak di atas tanah mereka. Gedung-gedung bertingkat dengan fasilitas mewah berdampingan dengan rumah-rumah papan sederhana masyarakat lokal. Pada relasi-relasi itulah yang terjadi bukan hanya penjajahan dalam bentuk penetrasi ekonomi global, tapi lebih dalam kepada penjajahan secara produktif dalam cara berpikir yang dilakukan industri ekonomi global yang menggandeng

pemerintah daerah dalam melakukan intervensinya. Penjajahan itu dilakukan melalui serangkaian teori dan pendekatan politik budaya yang diskriminatif, dipraktikkan dengan massif dalam kerangka “pembangunan masyarakat tertinggal”. Maka tak heran jika citra Papua yang lahir kemudian adalah tidak berbudaya, bodoh, terkebelakang, terasing, barbar. “Indonesia *dorang*” merancang secara sistematis yang menempatkan Bangsa Papua tidak punya kebudayaan. Walaupun punya, derajatnya lebih rendah dari kebudayaan Indonesia dan “terasing” tidak dinamis. Kesaksian seorang masyarakat di birokrasi menunjukkan hal ini. Meski tidak disebutkan dalam kata-kata, dalam modul-modul pelatihan aparat pemerintah, perspektif berpikir diskriminatif ini terus-menerus terjadi.

Pendekatan semacam itu tentu mengabaikan hati, perasaan, pergolakan, kepedihan, siasat, dan resistensi yang dialami Bangsa Papua. Kompleksitas sejarah dan status politik Tanah Papua dan heterogenitas bangsa Papua seolah terlupakan. Rezim otoritarian Orde Baru sejak 1969 menjadikan Tanah Papua sebagai objek pembangunan dengan penyeragaman di segala bidang tanpa rekognisi pada perdebatan sejarah, status politik dan juga beragamnya budaya di Tanah Papua. Pendekatan keamanan, kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan melahirkan tragedy kemanusiaan tanpa henti di Bumi Cenderawasih ini. Sejarah ingatan penderitaan (*memoria passionis*) menjadi pengikat yang paling ampuh untuk “melawan kehadiran Indonesia” yang tak akan lekang ditelan jaman.

Masyarakat tempatan di Papua bisa dikatakan menjadi daerah di garis depan (*frontier*) pertemuan kekuatan-kekuatan kapital global dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang disebut oleh Tsing (2005; Laksono, 2009)

sebagai friksi. Dalam pertemuan di ruang-ruang *frontier* itulah menuntut masyarakat tempatan untuk memanfaatkan peluang, bersiasat dan sekaligus berpolitik. Di dalamnya akan dijumpai fragmen-fragmen yang menunjukkan interkoneksi yang aneh, tak terduga, kreatif, dan tak stabil. Apa saja akan menjadi komoditi, barang dagangan, direproduksi terus-menerus. Identitas budaya bagi masyarakat tempatan pada dunia friksi ini menjadi sangat problematik karena akan direproduksi terus-menerus dalam interkoneksinya dengan kekuatan global dan siasat (berpolitik) yang tiada henti.

Saya kemudian teringat bagaimana siasat dan perjuangan mama-mama Papua mendapatkan akses ke pasar untuk menjual produk hasil bumi. Di Pasar Sanggeng misalnya, mama-mama Papua menggelar dagangan berjejer di tanah, sementara pasar tingkat yang menyediakan kios-kios dikhususkan untuk para pedagang yang memiliki modal besar untuk membayar sewa kios. Situasi dilematis dan terjepit yang dihadapi oleh rakyat Papua di tengah kepingan modal dan limpahan kekayaan alam yang terdapat di negeri Cenderawasih ini.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, George. (2000). *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Elsam.
- Al Rahab, Amiruddin. (2010). *Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Jakarta: Komunitas Bambu, Imparsial dan Foker LSM Papua.
- Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- Chauvel, Richard. (2008). "Rules in Their Own Country?: Special Autonomy and Papuan Aspirations Have been Thwarted by Jakarta and Hampered by the Administrative Fragmentation Sponsored by Local Politicians," dalam *Inside Indonesia*.
- Giay, Beny. (2000). *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Laksono, P.M. (2009). "Intervensi PGR dalam Reformasi Pemerintahan di Papua dari Perspektif Sosial Budaya" (paper tidak diterbitkan).
- Laksono, P.M (2009). *Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
- Sumule, Agus. (2003). *Satu Setengah Tahun Otsus Papua: Refleksi dan Prospek*. Manokwari: Yayasan Topang.
- Suryawan, I Ngurah. (2010). "Pemekaran Daerah dan Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat" Makalah belum diterbitkan dalam Seminar Internasional Percik 2010 di Salatiga.
- Tebay, Nales. (2009). *Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua*, Jayapura: SKP.
- Timmer, Jaap. (2007). "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua" (h. 596-625) dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Kliken dibantu oleh Ireen Karang-Hoogenboom (eds), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta.
- Tsing, A.L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Widjojo Muridan. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past*

and Securing the Future. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA. “FPSBA Serukan Balonbup Nor Arfak Mundur”, *Cahaya Papua*, 12 April 2010.

Lihat catatan lapangan dari media lokal di Kota Manokwari yaitu *Cahaya Papua*: <http://cahayapapua.co.id/2011/03/16/12-parpol-sokong-mandacan-nauw/> (diunduh 5 Juni 2011).